

OPTIMALISASI PENCAPAIAN TARGET RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Oleh

CUCU JUARIAH

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP Universitas Galuh Ciamis

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa pendapatan asli daerah dari sektor retribusi kebersihan tidak mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah? 3) Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah? Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala dan pegawai. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa : 1) Optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 70 % menyatakan baik dan sebanyak 30 % menyatakan kurang baik. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum optimal mengingat masih banyaknya sumber pendapatan retribusi yang dapat dioptimalkan. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hal ini disebabkan kemampuan petugas yang masih kurang dalam memahami aturan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Berdasarkan hasil observasi bahwa pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan belum optimal. 3) Adanya upaya-upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah hal ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan petugas dalam memahami aturan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dilakukan upaya optimalisasi pencapaian target penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Retribusi Persampahan/Kebersihan, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, dinyatakan bahwa : Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu

Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka daerah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam membiayai rumah tangganya sendiri serta untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu peningkatan sumber pendapatan daerah dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal (1) angka 35 menyatakan : Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan

pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk Pendapatan Asli Daerah yang dalam hal ini masih mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk menggali pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pendapatan asli daerah dari sektor retribusi kebersihan tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

Penerimaan retribusi kebersihan selama beberapa tahun anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan, hal ini dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 1
PERINCIAN TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
TAHUN 2013-2014

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2013	892.595.400	736.836.500	82,55 %
2	2014	686.965.100	683.953.600	99,56 %

Sumber Data : Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Kabupaten Pangandaran, Tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2003-2014 penerimaan realisasi retribusi kebersihan pada Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Kabupaten Pangandaran tidak pernah memenuhi target secara optimal hal ini terlihat dari pencapaian target pada 2013 hanya sebesar 82.55% dari target yang dianggarkan sebesar RP. 892.595.400 hanya dapat direalisasikan sebesar 736.836.500.

Begitupula pula pada tahun 2014 hanya tercapai sebesar 99,56% karena dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 686.965.100 hanya tercapai sebesar Rp. 683.953.600. Data tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam

Optimalisasi Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
Oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran
CUCU JUARIAH

upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal.

Hal tersebut diduga belum optimalnya pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dikarenakan belum diterapkannya cara-cara optimalisasi pemungutan retribusi.

Permasalahan yang terjadi sangatlah luas dan kompleks, karena itu supaya lebih spesifik penelitian ini difokuskan pada hal berikut ini: 1) Bagaimanakah optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, dinyatakan sebagai berikut : Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan Presiden.

Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada di tangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan demikian maka pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat mengelola berbagai sumber pendapatan yang dapat digunakan dalam membiayai kebutuhan daerahnya, maka pelaksana suatu kebijakan dapat menetapkan suatu target sehingga dapat melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan secara optimal.

Menurut Sumitro (2007:69) menyatakan bahwa :

Pengertian optimalisasi hampir sama dengan efisiensi, akan tetapi terdapat perbedaan dari tujuan yaitu efisiensi tujuan akhirnya adalah menentukan biaya satuan. Sedangkan optimalisasi adalah meningkatkan pendapatan, Akan tetapi keduanya sama, yaitu mencapai target yang diperoleh organisasi.

Sedangkan menurut Okawati (2009:145) menyatakan bahwa "Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti yang terbaik. Jadi optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan".

Begitupula dengan peningkatan pendapatan asli daerah maka pelaksana kebijakan diharapkan dapat mencari cara untuk mencapai target yang ditetapkan. Pendapatan asli daerah menjadi hal pokok untuk digali dan dikembangkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, hal-hal yang dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah perlu dianalisis.

Menurut Rahman (2005:38) menyatakan bahwa :

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Machfud Sidik,
(<http://portalgaruda.org/article.php?article>)

tanggal akses Senin 9 Februari 2015, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Informan dalam penelitian ini yaitu 10 orang yang terdiri dari kepala dan pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran yang

menangani masalah pemungutan retribusi kebersihan. Teknik pengumpulan data adalah :

- a. Study Pustaka (*Literature study*)
- b. Studi Lapangan:
 - 1) Observasi
 - 2) Wawancara (*interview*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal hal ini dibuktikan dengan hasil rekapitulasi sebagai berikut :

TABEL 1

Rekapitulasi Hasil Wawancara Tentang Optimalisasi Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Olehbidang Bina Marga Dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sub Variabel	Indikator	Tanggapan Informan	
Memperluas basis penerimaan	1) Mengidentifikasi pembayar baru/potensial	Informan 1, 2, 3, dan 5 atau 40 % menyatakan sudah baik	Informan 4, 6,7,8, 9 dan 10 atau 60% menyatakan kurang baik
	2) Mengidentifikasi jumlah wajib retribusi sampah	Informan 3, 4, dan 5 atau 30% menyatakan sudah baik	Informan 1, 2, 6,7, 8,9dan 10 atau 70% menyatakan kurang baik
	3) Memperbaiki data objek retribusi sampah	Informan 1, 7,9 dan 10 atau 40 % menyatakan sudah baik	Informan 2,3,4,5,6 dan 8 atau 60% menyatakan kurang baik
	4) Menghitung kapasitas penerimaan dari setiap pungutan retribusi sampah.	Informan 3, 7, dan 9 atau 30% menyatakan sudah baik	Informan 1, 2,4,5,6,8 dan 10 atau 70% menyatakan kurang baik
Memperkuat proses pemungutan	1) Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi sampah	Informan 1, 3 dan 5 atau 30% menyatakan sudah baik	Informan 2,4,6,7,8, 9, dan 10 atau 70% menyatakan kurang baik
	2) Adanya dukungan dalam melaksanakan peraturan daerah tentang retribusi sampah	Informan 1, 4,5,6 dan 7 atau 70% menyatakan sudah baik	Informan 8,9 dan 10 atau 30% menyatakan kurang baik

**Optimalisasi Pencapaian Target Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
Oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangandaran
CUCU JUARIAH**

	3) Meningkatkan sumber daya manusia yang memungut retribusi sampah	Informan 1,4,7,8 dan 9 atau 5 % menyatakan sudah baik	Informan 2,3,5,6 dan 10 atau 5 % menyatakan kurang baik
Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pemungutan	1) Melakukan pemeriksaan secara berkala kepada objek retribusi sampah	Informan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 atau 50% menyatakan sudah baik	Informan 6, 7, 8, 9,dan 10 atau 50 % menyatakan kurang baik
	2) Menerapkan sanksi terhadap penunggak retribusi sampah	Informan 1,2,3 ,4, 5, 6 dan 10 atau 70 % menyatakan sudah baik	Informan 7,8 dan 9 atau 30% menyatakan kurang baik
	3) Melakukan pengawasan terhadap pemungut retribusi sampah	Informan7,8,9 dan 10 atau 40.00% menyatakan sudah baik.	Informan 1,2,3,4, 5, 6, dan 10 atau 70 % menyatakan kurang baik
Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan	1) Mempermudah administrasi pemungutan retribusi sampah	Informan 2,3,4 dan 5 atau 50 % menyatakan baik	Informan 1,6,7,8,9 dan 10 atau 50% menyatakan kurang baik
	2) Penetapan biaya pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak memberatkan.	Informan4, 5, dan 10 atau 30 % menyatakan baik	Informan 1,2,3,6,7,8 dan 9 atau 70% menyatakan kurang baik
Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik	1) Adanya koordinasi dalam pemungutan retribusi sampah	Informan 1, 2,3,8, 9 dan 10 atau 60% menyatakan sudah baik	Informan 4,5,6 dan 9 atau 40% menyatakan kurang baik
	2) Adanya kerjasama antar petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi	Informan 1,2,3 ,4, 5, 6 dan 10 atau 70 % menyatakan sudah baik	Informan 7,8 dan 9 atau 30% menyatakan kurang baik
	3) Membantu dan membimbing wajib retribusi dalam menghitung, membayar dan melaporkan retribusi.	Informan7,8,9 dan 10 atau 40.00% menyatakan sudah baik.	Informan 1,2,3,4, 5, 6, dan 10 atau 70 % menyatakan kurang baik
Rata-rata Persentase		70%	30 %

Sumber : Rekapitulasi Hasil Wawancara, 2015.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 70 % menyatakan baik dan sebanyak 30 % menyatakan kurang baik.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa optimalisasi pencapaian target

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal mengingat masih banyaknya sumber pendapatan retribusi yang tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan yang ditentukan sehingga menyebabkan pendapatan asli daerah tidak tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Hambatan-hambatan dalam Optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum optimal yang disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan petugas dalam melaksanakan pemungutan retribusi. Untuk mengetahui sejauhmana hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, berikut penulis sajikan hasil wawancara sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu petugas dengan memberikan data objek retribusi sehingga petugas kurang melaksanakan tugasnya dengan baik karena kurangnya informasi yang diperoleh petugas dari masyarakat selaku wajib retribusi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga dan Cipta Karya diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah Hotel di Pangandaran sangat banyak yang termasuk objek pajak kelas I namun sampai saat ini pemilik hotel belum melaporkan kepada petugas sehingga masih termasuk objek pajak kelas 2.
- 2) Kurangnya pelaksanaan pengarahannya mengenai ketentuan dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan sehingga menyebabkan petugas yang masih baru tidak memahami ketentuan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga dan Cipta Karya diketahui bahwa pada tahun 2014 pasca Kabupaten Pangandaran menjadi daerah otonomi baru menyebabkan banyaknya petugas yang berasal dari Kabupaten Ciamis tidak mau di tempatkan di Pangandaran sehingga

mencari alternatif dengan menambah jumlah tenaga kontrak maupun honorer namun alternatif tersebut menyebabkan pemahaman terhadap ketentuan masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal mengingat masih adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan target penerimaan retribusi tidak menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran, berikut penulis sajikan hasil wawancara mengenai upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sesuai ketentuan dengan melakukan pendekatan kepada wajib retribusi dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar retribusi kebersihan/persampahan sesuai dengan ketentuan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga dan Cipta Karya diketahui bahwa selama tahun 2014 dilakukan upaya sosialisasi secara rutin kepada masyarakat sehingga dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar retribusi persampahan/kebersihan.

2) Meningkatkan pelaksanaan pengarahannya mengenai ketentuan dalam pemungutan retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan terutama kepada petugas yang masih baru yang memahami ketentuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Marga dan Cipta Karya diketahui bahwa selama tahun 2014 dilakukan pengarahannya kepada setiap petugas terutama petugas baru sehingga dapat memahami berbagai ketentuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dilakukan upaya optimalisasi pencapaian target retribusi pelayanan persampahan/kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan meningkatkan target penerimaan retribusi sehingga menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 70 % menyatakan baik dan sebanyak 30 % menyatakan kurang baik. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal mengingat masih banyaknya sumber pendapatan retribusi yang dapat dioptimalkan.

2. Adanya hambatan-hambatan dalam optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah hal ini disebabkan oleh kurang menunjangnya peraturan pelaksanaan pemungutan daerah, kemampuan petugas yang masih kurang dalam memahami aturan, kukrangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi serta kurangnya mendapatkan dukungan dari berbagai instansi yang diajak bekerjasama. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal mengingat masih adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan target penerimaan retribusi tidak menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran.

3. Adanya upaya-upaya dalam optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah hal ini dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai peraturan pelaksanaan pemungutan daerah, meningkatkan kemampuan petugas dalam memahami aturan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi serta meningkatkan dukungan dari berbagai instansi yang diajak bekerjasama dalam membantu pemungutan retribusi. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dilakukan upaya optimalisasi pencapaian target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

dengan meningkatkan target penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehingga menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pangandaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan daerah sehingga dapat dipahami oleh petugas pemungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan hal ini dikarenakan salah satu permasalahan tidak tercapainya target pendapatan asli daerah disebabkan pemahaman petugas terkait tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang masih kurang.
2. Bidang Bidang Marga dan Cipta karya sebaiknya melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan melalui peningkatan sumber daya manusia pemungut retribusi serta memberikan penjelasan kepada petugas pelaksana serta memberikan sanksi yang tegas dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Bagi petugas pemungut retribusi sebaiknya dapat melaksanakan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehingga hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
4. Bagi masyarakat sebaiknya menyadari kewajibannya untuk membayar Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sehingga dapat meningkatkan penerimaan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.
 Ahmad Yani. 2002 . *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
 Fandy Tjiptono, 2007, *Strategi Pemasaran*. Edisi ke dua, penerbit Andi,. Yogyakarta

Halim, Abdul dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP. STIM YKPN, Yogyakarta.
 Hasan. Ali. 2008. *Marketing*. Media Utama, Yogyakarta
 Ilyas.Y, 2001. *Kinerja Teori Penilaian & Penelitian*. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan FKM UI,Depok.
 Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi.
 Marsyahrul, Tony. 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta : Grasindo.
 Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya
 Munawir. 1990. *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta.
 Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta:Bumi Aksara
 Siahaan, Marihot P, 2005 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,PT. Raja Grafindo.
 Siahaan. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo. Persada, Jakarta
 Soemitro, Rochmat. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: PT. Eresco
 Sondang P. Siagian, 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Elek Media Kompetindo
 Sondang P. Siagian. 1985 , *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi. Aksara.
 Sugiyono 2004 , *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
 Supranto J. 2007, *Statistik Teori Dan Aplikasinya*, Jilid 1, Erlangga, Jakarta
 Winardi, 1999, *Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*, Bandung : Mandar Maju.
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah
 Keputusan Mendagri Nomor 970.05.442 tanggal 16 Desember 1980 tentang Administrasi Pendapatan Daerah
 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan